KILAS BALIK

KIPRAH PSP IPB DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Oleh: Sumardjo

Periode 1983–1991. Di dalam kiprahnya Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (PSP IPB) telah tercatat beberapa karya dan konsep penting yang di dalam perkembangannya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun bangsa ini. Kontek "pembangunan" di sini adalah bahwa kegiatan PSP IPB dalam masa 1983-1991 merupakan era pembangunan lima tahun pada Jangka Panjang Tahap Pertama, saat mana konsep-konsep perubahan sosial sedang gencar-gencarnya dilaksanakan secara sadar dan sengaja, dengan pola perencanaan yang terpusat. Pusat merencanakan pembangunan yang menurut pusat merupakan suatu pendekatan yang dianggap dapat mensejahterakan rakyat. Namun, banyak pengamat melihat fakta bahwa masalah keadilan dan pemerataan pembangunan masih lemah, meskipun telah dinilai terjadi pertumbuhan dan stabilitas keamanan secara nasional.

Dalam kondisi seperti itulah PSP IPB pada saatnya berkiprah, dan tampaknya salah satu perhatian serius yang dikaji, selain aspek pertumbuhan adalah menyangkut masalah pemerataan tersebut. Tulisan ini merupakan catatan kecil, yang disusun dengan keterbatasan-keterbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan penyusun dalam mengingat dan menginterpretasi karya dan kiprah PSP IPB, serta begitu banyak dan beragamnya karya penelitian di PSP IPB dalam kurun waktu 1983-1991. Karya dan konsep penting yang patut dicatat disini menurut interpretasi penulis antara lain berkaitan dengan:

1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional
2. Pentingnya Kepedulian terhadap Pemerataan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat Khususnya Lapisan Bawah
3. Pengembangan Indikator Sosial Kesejahteraan Rakyat

4. Konsep-konsep tentang pengukuran dan penanggulangan kemiskinan
5. Pengembangan peluang usaha/ kerja pedesaan dan di sektor luar pertanian
6. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
7. Masalah Agraria

Dalam uraian yang sangat terbatas ini dicoba untuk dituangkan bagaimana karya-karya PSP IPB tersebut dihasilkan dan bagaimana karya tersebut berpotensi memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa ini. Dalam uraian singkat berikut ini dicoba dituangkan sekilas gambaran masing-masing karya tersebut.

1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional

Pengembangan sistem kewaspadaan pangan merupakan kerjasama antara PSP IPB dengan Departemen Kesehatan atas dukungan biaya dari USAID. Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan yang dikelola oleh Puslitbang Gizi Depkes RI, yaitu proyek Sistem Kewaspadaan Gizi.

Dalam penyusunan konsep dan pengembangannya, Profesor Sayogyo telah aktif terlibat, beserta empat orang asistennya yang kemudian bekerja di PSP IPB, yaitu Harianto, Sumardjo, Fredian Tonny dan Djuara P Lubis. Keempat orang ini setelah lulus sarjananya dan mengikuti proses dan kegiatan penyusunan konsep Sistem Informasi Dini dan Intervensi (SIDI) atau *early warning System*, dalam rangka pengembangan Sistem Kewaspadaan Gizi (SKG) ditempatkan di lokasi kecamatan-kecamatan miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat) dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah).

Sebelum keterlibatannya dalam penyusunan konsep SIDI Prof Sayogyo di Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB (LPSP IPB) telah banyak melakukan kegiatan penelitian terkait dengan kecukupan pangan, kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Konsep SKG tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan dan dampak krisis pangan yang pada waktu itu masih sangat memprihatinkan, serta menimbulkan kekhawatiran pada dampaknya berupa generasi yang kurang cerdas. Kondisi krisis pangan tersebut antara lain ditandai dengan masih meluasnya gejala yang dialami oleh masyarakat di daerah rawan pangan berupa kelaparan, kemungkinan kurang makan

(KKM), kurang makan (KM), dan yang lebih parah lagi adalah Kemungkinan Hongerodim (KHO) dan Hongerodim (HO).

Konsep SIDI dalam rangka SKG tersebut pada dasarnya adalah mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya dampak krisis pangan. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di daerah, dalam hal ini Bagian Kesra Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian adalah menghitung dan memprediksi kemungkinan terjadinya krisis pangan dan dampaknya, dengan cara :

1. Menghitung luas tanam, gangguan hama, gagal panen dan luas panen komoditas pertanian, sehingga dapat digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan dan kemungkinan terjadinya rawan pangan. Komoditi-komoditi yang diperhitungkan dalam prediksi tersebut adalah padi, jagung, ubi-kayu, ubi jalar, ubi-ubian lainnya dan palawija. Kegiatan prediksi kondisi kecukupan pangan ini dilakukan pada setiap musim, sekitar bulan Januari, Maret, April, Juni, dan September. Hasil dari prediksi ini adalah rekomendasi langkah yang harus diambil oleh Badan Perbagian Gizi Daerah (BPGD) yang terdiri dari lintas instansi terkait dengan masalah gizi dan kesehatan, untuk mengantisipasi kecukupan pangan dan gizi di daerah yang bersangkutan dan langkah-langkah preventif yang harus diambil.
2. Pada bulan September, Oktober, Nopember dilakukan monitoring secara tersistem konsumsi masyarakat secara sampling. Kegiatan monitoring ini ditempuh melalui sistem pelaporan aparat pemerintahan terkait dari desa sampai kabupaten. Prinsip pengembangan SIDI ini adalah sederhana, cepat, akurat dan tidak mengembangkan sistem yang baru, sehingga efisien dan meningkatkan kepedulian aparat terkait di masing-masing tingkat.

Gejala rawan pangan ditandai dengan peristiwa berikut, secara berurutan : kesulitan bertanam (antara lain keterbatasan modal, gangguan kurang hujan atau hujan terlambat), luas tanam lebih rendah dari normal, gangguan proses produksi (puso karena hama/penyakit tanaman, curah hujan tidak memadai), gagal panen atau harga jatuh. Kondisi seperti ini menyebabkan pola konsumsi berubah secara berturut-turut dari konsumsi pokok beras, bergeser kombinasi konsumsi beras dan jagung, lalu bergeser ke konsumsi jagung saja, dan akhirnya hanya memakan ubi-ubian (ubikayu/ ubi jalar), atau bahkan hanya umbi-umbian. Bila masyarakat sudah mulai makan umbi-umbian menjadi dominan dalam makan pokoknya, itu menunjukkan kondisi krisis pangan berat, yang disertai dengan tidak hanya KKM, KM bahkan sudah KHO dan HO. Artinya kondisi gizi masyarakat sudah sangat kekurangan dan berdampak parah bagi kesehatan masyarakat.

3. Pada masa itulah dinilai peran lumbung pangan sebenarnya sangat berarti dan potensial dikembangkan di masa depan, sebagai penyangga kecukupan pangan masyarakat dan kejatuhan harga produk pertanian di saat penen raya dan stok pangan di saat krisis. Pada waktu itu, sudah mulai ada kesadaran bahwa apabila pengelolaan lumbung tersebut dapat tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat secara swadaya, maka lumbung tersebut sangat berpotensi menjadi lembaga yang berperan penting dalam ketahanan pangan masyarakat.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan oleh Departemen Sosek Faperta IPB dalam bentuk proyek ketahanan pangan (*food resistence* atau *foord security*). Namun, sayangnya kegiatan ini kurang berkelanjutan, dan mestinya ke depan ada koordinasi yang baik antara Deptan, Depkes, Kesra dan Kimpraswil dan Dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten, sehubungan dengan pengembangan ketahanan pangan dan gizi ini. Salah satu kelemahan yang sangat mendasar dalam pengembangan sistem di birokrasi adalah kurangnya kesadaran atas kesinambungan sistem tersebut dan lemahnya penempatan tenaga yang ahli dalam jabatan atau posisi yang sesuai dengan keahliannya. Mutasi kepegawaian yang kurang memperhatikan keahlian SDM karyawan telah melumpuhkan upaya-upaya pengembangan sistem dan ketidakefisienan dalam struktur birokrasi tersebut.

Implikasi dari keadaan tersebut, seyogyanyalah dari segi sistem birokrasi pemerintahan perlu ditarik sebagai pelajaran bahwa yang perlu dikembangkan ke depan adalah :

1. Terbangunnya sistem birokrasi yang sederhana, efisien dan efektif dengan pola rekrutmen dan mutasi SDM sesuai dengan keahliannya, dengan demikian siapapun yang menjadi pucuk pimpinan bila sistemnya sudah berfungsi secara efektif maka akan memperkecil peluang ketidakefisienan dalam sistem birokrasi.

2. Koordinasi antar instansi terkait perlu dihindarkan dari kemungkinan ego sektoral dan terkotak-kotak dalam sistem sektoral yang sempit.
3. Kepedulian pemeritah daerah untuk berpihak pada keadilan dan memperhatikan rakyat kecil dan lemah, yang merupakan mayoritas masyarakat, untuk dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraannya, melalui sistem birokrasi yang efektif.
4. Kesinambungan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas seyogyanyalah menjadi komitmen pemimpin, baik di tingkat desa mupun sampai ke tingkat pusat, khususnya terhadap masalah pangan, gizi dan kesehatan.

2. Pentingnya Kepedulian terhadap Pemerataan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat Khususnya Lapisan Bawah

Sejak awal berdirinya tahun 1983 Pusat Studi Pembangunan telah bermitra dengan Biro Pusat Statistik, kini namanya berubah menjadi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis masalah-masalah kesejahteraan rakyat melalui pengolahan dan analisis data BPS. Selain itu, Prof. Sayogyo pada waktu itu sebagai pimpinan PSP IPB juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki data dan memiliki keahlian dalam pengolahan data. Kepemilikan atau penguasaan data inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama Pusat Studi Pembangunan IPB sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian. Boleh dikatakan koleksi data di Pusat Studi Pembangunan pada masa awal pengembangan tersebut sudah sangat lengkap, mulai dari Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi, SUPAS, Data Tataguna Tanah, Sensus Industri, baik dalam bentuk print out, buku (*hard copy*), maupun dalam bentuk disket, dan *tape*. Berbagai penelitian dan pemikiran tidak terlepas dari dukungan data, selain fakta kualitatif dan empiris, sehingga kondisi seperti ini lebih berpotensi membuat karya-karya PSP IPB di masanya, baik sebagai suatu lembaga maupun personilnya menjadi realistis.

Para penelitinya dididik untuk mampu melakukan dan menganalisis data secara kualitatif tetapi juga mempunyai kepedulian dan kemampuan yang tinggi terhadap pengolahan, analisis dan pemanfaatan data kuantitatif. Sayogyo, dan kebanyakan para peneliti di PSP menekuni dalam bidang ilmu-ilmu sosial tetapi sangat gemar melakukan eksplorasi dengan data-data kuantitatif, sehingga berbagai pemikirannya hampir selalu diperkuat dengan data-data kuantitatif. Inilah salah satu kelebihan utama dari seorang figur pemimpin PSP IPB di masa itu. Fakta ini dapat dilihat beberapa pemikirannya dan juga karya para peneliti di Pusat Studi Pembangunan IPB yang senantiasa berkembang mengenai topik-topik berikut :

1. Garis Kemiskinan (Sayogyo, 1978-1983)
2. Profil Rumahtangga Pertanian, Pola Pemilikan Tanah, dan Masalah Petani Berlahan Sempit (Sayogyo, Kolopaking dan Sumardjo) didasarkan pada Data Sensus Pertanian 1983.
3. Pangan dan Gizi dalam Pembangunan Semesta (Sayogyo, 1983)
4. Penggunaan Tanah Pertanian, Masalah Pertanahan dan Kedudukan petani (Lestario dkk, 1983)
5. Analisis Pendapatan Petani (Sayogyo, Harianto, Tonny, 1983)
6. Analisis Usaha Perkebunan Kopi dan Teh Rakyat (Soeharjo dan Sitorus, 1983)
7. Evaluasi Pembangunan Desa (Sayogyo, Sumardjo, dan Kolopaking, 1983)
8. Kesejahteraan Penduduk di Propinsi Jawa Barat Perbandingan antara Daerah Pedesaan dan Daerah Kota (Kuntjoro U., Kusnadi, Lubis dan Fadhil, 1985)
9. Integrasi Wanita Pedesaan dalam Proses Pembangunan di Sumatra dan Jawa Barat (Sayogyo, P, 1984)
10. Peranan Pusat Pelayanan Koperasi di Jawa Tengah (Utomo dan Kusumah, 1984)
11. Analisis Sektor Informal di Propinsi Jawa Barat (Sri Hartoyo, Kolopaking dan Tonny, 1985)
12. Pengaruh Sistem Pariwisata di Bali terhadap Peranan dan Peluang Bekerja Wanita Pedesaan (Sutjipta dan Sudarta, 1985)

Di luar itu ada puluhan penelitian telah dilakukan pada awal berdirinya PSP IPB ini dengan menempatkan masyarakat pedesaan dan lapisan bawah menjadi perhatian utama. Hal ini barangkali tidak banyak penelitian lain yang peduli terhadap nasib golongan lemah dan yang secara tidak sadar terpinggirkan dalam proses pembangunan. Tersirat misi yang jelas dari PSP IPB, walaupun tidak tersurat dalam berbagai dokumen resmi yang ada, bahwa keadilan yang beradab masih sangat memerlukan upaya dan energi yang besar di dalam pembangunan di Indonesia ini pada waktu itu maupun pada masa-masa berikutnya.

Menarik dikemukakan disini, bahwa berbagai kegiatan yang peduli terhadap masyarakat miskin dan lapisan bawah masyarakat tersebut dilakukan dikala pemerintah pada waktu itu dapat dikatakan masih "alergi" terhadap kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan. Namun, semua mengetahui, ketika pemerintah sudah merasa cukup "percaya diri" untuk mengungkapkan fakta tentang adanya kemiskinan dan ketertinggalan tersebut, maka karya-karya PSP IPB sebenarnya banyak yang kemudian relevan dengan kondisi pembangunan di kemudian hari. Suatu indikasi bahwa PSP IPB telah melangkah lebih awal meskipun untuk itu dihadapkan pada tentangan-tentangan kebijaksanaan pada tataran makro. Langkah awal yang baik ini, juga diteruskan pada masa-masa berikutnya, dapat diikuti pada uraian selanjutnya, mengenai indikator kesejahteraan sosial berikut ini.

3. Pengembangan Indikator Sosial Kesejahteraan Rakyat

Sejak semula, PSP IPB mempunyai perhatian yang besar terhadap indikator kesejahteraan rakyat, ditandai dengan banyaknya penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian-penelitian yang menggunakan analisis data sekunder dalam merumuskan indikator sosial ini dapat dilihat misalnya dari beberapa topik penelitian berikut:

1. Penelitian Indikator Sosial Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan, sebuah kumpulan hasil kajian kualitatif (Sayogyo, Sumardjo, Kolopaking, Tonny dan Fadhil, 1984).
2. Membanding Tingkat Kesejahteraan Rakyat antar Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat (Harianto, Sumardjo dan Sayogyo, 1985).
3. Tipologi Kecamatan Berdasarkan Tingkat Perkembangan Sektor Tradisionil dan Sektor Modern (Sumardjo, 1989).

Selain itu juga banyak penelitian yang berbasis data kualitatif maupun kuantitatif yang kemudian menghasilkan berbagai indikator kesejahteraan sosial atau indikator kemiskinan suatu Daerah. Beberapa indikator kesejahteraan tersebut kemudian banyak kemiripan dengan berbagai indikator yang digunakan untuk berbagai keperluan mengidentifikasi kemiskinan dan ketertinggalan beberapa tahun kemudian. Disini dapat disebutkan indikator ketertinggalan yang dirumuskan pada pertengahan tahun 1985 itu dikemudian hari

(5-8 tahun kemudian) ditemukan banyak kemiripan dengan indikator yang digunakan atau dijadikan sebagai indikator desa tertinggal dalam Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikembangkan pasca tahun 1990an.

Walaupun tidak sama persis bahkan kemudian kadang tidak tepat betul dalam mempersepsikan makna indikator oleh kebanyakan kalangan, di dalam indikator sosial IDT adalah indikator ketertinggalan suatu unit wilayah, dan bukan serta merta merupakan suatu indikator kemiskinan seluruh masyarakat dalam wilayah desa IDT itu. Sebagian indikator sosial yang dikembangkan pada tipologi tingkat perkembangan sektor tradisional dan sektor modern oleh PSP IPB itu, yang dinilai cukup signifikan di masa itu (tahun 1980-1990an), untuk mengidentifikasi Daerah Tertinggal antara lain dapat disebutkan disini :

Dengan asumsinya yang telah teruji makin besar nilai variabel indikator berikut ini menunjukan bahwa wilayah tersebut makin tertinggal

1. Persentase wilayah Desa yang termasuk katagori "rural"
2. Jarak desa-kecamatan
3. Jarak desa-kota/ kabupaten
4. Ketergantungan kehidupan penduduk terhadap lahan kering
5. Ketergantungan kehidupan penduduk terhadap hasil laut (nelayan)
6. Frekuensi mengalami bencana alam
7. Kelahiran setahun yang lalu per seribu penduduk
8. Persentase lahan kering per luas lahan pertanian setempat
9. Persen luas bangunan*)
10. Persen rumahtangga pertanian
11. Persen luas lahan kritis per kecamatan
12. Persen rumahtangga budidaya tambak per desa
13. persentase jumlah penderita penyakit per 1000 penduduk yang muncul per desa per tahun
14. Persentase jumlah kepala desa dengan tingkat pendidikan SD ke bawah per kecamatan

Catatan : *) dalam hasil uji analisis faktor/ *principle component* tidak cukup signifikan.

Dengan asumsi yang telah teruji pada wilayah yang makin tertinggal variabel inikator berikut ini menunjukkan gejala cenderung nilai makin kecil

1. Persentase desa bukan pantai
2. Ketergantungan kehidupan penduduk terhadap lahan sawah
3. Ketergantungan kehidupan penduduk terhadap sektor industri dan jasa
4. Tingkat kepadatan penduduk
5. Tingkat kepadatan agraris
6. Persen luas lahan sawah dua kali panen setahun
7. Jumlah kematian setahun lalu per seribu penduduk
8. Persen rumahtangga industri/ kerajinan
9. Persen rumahtangga di sektor jasa dan perdagangan
10. Persen penduduk usia sekolah yang masih sekolah
11. Persen rumahtangga pengguna bahan bakar gas, listrik dan minyak tanah
12. Persen rumahtangga pengguna jamban/ kakus milik sendiri
13. Persen rumahtangga yang mengalami pencemaran lingkungan
14. Jumlah kelembagaan/ organisasi masyarakat per desa
15. Jumlah perusahaan berbadan hukum per desa
16. Jumlah rumahtangga peternak ruminansia
17. Rasio Taman Kanak-kanak per seribu penduduk
18. Rasio sekolah menengah pertama per desa
19. Rasio jumlah guru-murid SD
20. Jumlah sarana kesehatan termasuk juga posyandu per desa
21. Jumlah dokter per seribu penduduk
22. Jumlah tenaga medis/ para medis per seribu penduduk
23. Persen Desa dengan jalan utama beraspal
24. Rasio TV Rumahtangga per seribu penduduk
25. Rasio pesawat telepon per seribu penduduk
26. Rasio jumlah pasar/ kios per seribu penduduk
27. Jumlah lembaga perkreditan per seribu penduduk
28. Rasio tempat ibadah per seribu penduduk
29. Jumlah tenaga kerja di sektor jasa, bangunan dan konstruksi
30. Jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran
31. Jumlah tenaga kerja di sektor jasa angkutan
32. Jumlah tenaga kerja di sektor industri

Dalam tipologi wilayah kecamatan atau kabupaten dengan menggunakan indikator tersebut ditetapkan empat tipologi wilayah secara relatif, yaitu :

1. Tipe wilayah dengan sektor modern dan sektor tradisional maju
2. Tipe wilayah dengan sektor modern maju dan sektor tradisional tertinggal
3. Tipe wilayah dengan sektor modern tertinggal dan sektor tradisional maju
4. Tipe wilayah dengan sektor modern dan sektor tradisional tertinggal

Variabel-variabel yang secara statistik cenderung muncul menandai sektor modern antara lain: akses sarana jalan aspal, keterlibatan penduduk dalam sektor industri kecil, menengah dan besar, kepadatan penduduk tinggi, kepadatan agraris tinggi, keterlibatan penduduk dalam sektor jasa perdagangan, menengah dan besar, hotel dan restoran, serta sarana transportasi dengan kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan bakar minyak, gas dan listrik. Sedangkan sektor tradisional ditandai dengan dominasi variabel-variabel yang berhubungan dengan budaya tradisional, misalnya tingginya persentase keterlibatan penduduk dalam sektor pertanian, industri kerajinan rumahtangga, sektor perdagangan kecil/ usaha rumahtangga, penggunaan bahan bakar kayu dan arang, ketergantungan pada hasil laut secara sederhana (nelayan dan tambak sederhana), dan lokasi wilayah berjarak jauh dari ibukota kabupaten atau kecamatan, serta terbatasnya jumlah kios/ warung.

Berbagai indikator tersebut telah teruji dan tentu saja hasil uji ini berlaku pada masa tahun sekitar 1985an, saat penelitian-penelitian tentang indikator sosial tersebut dilakukan. Pada masa IDT sekitar tahun 1990an, asumsi-asumsi tersebut tampaknya relatif sejalan dengan asumsi yang digunakan dalam menetapkan desa IDT beberapa tahun kemudian. Pada saat ini, asumsi-asumsi tersebut perlu diuji kembali, misalnya dengan perkembangan pembangunan perikanan dan kelautan, serta meningkatnya teknologi dan kualitas hasil laut, apakah masih menempatkan mata pencaharian hasil laut masih pada sektor tradisional, perlu diuji kembali.

Sehubungan dengan pengembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dengan indikator kuantitatif tersebut juga telah pula dilakukan pengukuran tingkat kemiskinan melalui ukuran tingkat pendapatan. Untuk mengukur tingkat pendapatan suatu keluarga tidaklah mudah, misalnya pinjaman atau pemberian dari pihak lain dan sejenisnya sering tidak terperhitungkan. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pendapatan suatu keluarga melalui pendekatan tingkat pengeluaran tampaknya relatif lebih obyektif dan memadai. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa semua pendapatan pasti akan dikeluarkan, termasuk untuk disumbangkan pada pihak lain maupun untuk ditabung. Jadi prinsip dasarnya adalah neraca pemasukan dan pengeluaran itu terjadi secara berimbang (*balance*).

Di saat berbagai pihak enggan atau takut untuk membicarakan masalah kemiskinan, Sayogyo dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapinya telah menekuni penelitian masalah kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat, antara lain dengan mengemukakan konsep garis kemiskinan, dengan menggunakan kesetaraan terhadap beras. Suatu pendekatan yang tampaknya sangat relevan pada kondisi di Indonesia, apalagi beras kini semakin nyata menjadi makanan pokok yang bergengsi di Indonesia. Pada hal, pada saat rumusan kesetaraan dengan beras ini dipikirkan, adalah pada masa dimana masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih menempatkan makanan pokok selain beras, misalnya di Indonesia Timur pada waktu itu masih banyak yang mengkonsumsi jagung dan sagu sebagai makanan pokok.

Garis kemiskinan Sayogyo dihitung dengan proksi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan disetarakan dengan beras. Garis kemiskinan untuk di kota dibedakan dengan di desa, dan garis kemiskinannya tidak hanya satu, yaitu tiga : sangat miskin, miskin sekali, dan miskin. Setelah tahun 1983an Sayogya bahkan menambahkan garis kemiskinan yang baru yaitu "hampir miskin". Hal ini menggambarkan betapa seorang Sayogyo, seorang figur pemimpin PSP IPB, menginginkan kewaspadaan dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan, bahkan sebelum masyarakat mengalami dampak kemiskinan itu sendiri. Ibarat berdiri di dalam air, kelompok hampir miskin ini ibarat permukaan air berada di garis mulut, sehingga bila ada riak yang agak besar air bisa masuk hidung dan tidak bisa bernafas. Oleh karena itu yang bersangkutan harus berbuat sedemikian rupa agar air tidak masuk hidung dan tetap dapat bernafas, untuk tidak berhenti bernafas. Data utama yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan pada waktu itu adalah data SUSENAS, karena memang data itulah yang tersedia secara kontinyu dan paling dapat diandalkan secara nasional keberadaannya. Garis kemiskinan Sayogyo yaitu :

- Katagori "miskin" di perkotaan pengeluaran <480 kg setara nilai beras, "miskin" di pedesaan pengeluaran <320 kg setara nilai beras.
- Katagori "miskin sekali" di perkotaan pengeluaran <360 kg setara nilai beras, "miskin sekali" di pedesaan pengeluaran <240 kg setara nilai beras.
- Katagori "sangat miskin" di perkotaan pengeluaran <270 kg setara nilai beras, "sangat miskin" di pedesaan pengeluaran <180 kg setara nilai beras.

Nilai pengeluaran tersebut dihitung dalam kilogram per kapita per tahun.

Nilai beras di berbagai tempat dan wilayah yang berbeda juga berbeda, demikian juga nilai barang-barang lainnya fluktuasi besarnya nilai antar barang relatif sejalan dengan fluktuasi nilai (Rp) beras tersebut. Ketika beras mahal secara relatif di suatu tempat, kecenderungan barang yang lain juga mahal. Tampaknya kondisi harga seperti itu terkait dengan tingkat keterisolasian atau aksesibilitas terhadap infrastruktur ekonomi. Jadi kalau dirupiahkan, meskipun nilai setara berasnya sama, tetapi besarnya rupiah bisa berbeda. Misalnya, nilai satu kilogram beras yang dengan kualitas sama (umum berlaku di pasaran dan kualitas beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat) di Jakarta Rp 2.500,- , pada saat yang sama di salah satu lokasi transmigrasi di Kalimantan sebesar Rp. 3.500,-, di Sumatra sebesar Rp 3.300,-, dan di Sulawesi Rp. 3.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kalori setara nilai beras relatif dapat diperbandingkan dan diandalkan antar daerah yang berbeda pada waktu yang sama.

Sekedar perbandingan, garis kemiskinan yang juga dapat dinilai relatif baik untuk digunakan secara mantap adalah yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu dengan menggunakan dolar US. Keluarga dikatagorikan miskin untuk di perkotaan apabila penghasilan per kapitanya senilai < US$75 dan di pedesaan <US$50. Penetapan tingkat kemiskinan Bank Dunia ini juga sejalan dengan pendapat Sayogyo, yang membedakan antara pedesaan berbeda dengan perkotaan.

Penelitian Sumardjo tahun 1991 dengan topik karakteristik pengeluaran rumahtangga atas data SUSENAS menunjukkan beberapa hasil antara lain: pada keluarga yang relatif kurang sejahtera porsi (persentase) pengeluaran untuk konsumsi makan pokok lebih besar, pada keluarga yang semakin kurang sejahtera porsi tersebut semakin besar. Porsi pengeluaran untuk keperluan-keperluan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan, pada keluarga yang semakin kurang sejahtera semakin besar. Namun, untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok "pendidikan" tidak menunjukkan gejala demikian, ini juga berarti bahwa pada saat itu, kesadaran untuk memprioritaskan pendidikan dalam pengeluaran rumahtangga miskin masih rendah, di samping tingkat kemampuan untuk membiayai pendidikan juga memang masih lemah.

Kini telah sangat banyak indikator kuantitatif dikembangkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan masing-masing, dengan pendekatan dan pemikiran masing-masing. Di satu sisi menggambarkan suatu indikasi peningkatan kepedulian terhadap masalah kemiskinan tetapi di sisi lain bahkan terkesan membingungkan, karena saratnya kepentingan-kepentingan di dalam perumusan indikator tersebut.

Di sini juga terbukti, bahwa PSP IPB juga telah melangkah lebih awal dalam pengukuran indikator sosial kesejahteraan rakyat. Selain itu, indikator-indikator sosial yang berdasarkan informasi kualitatif pun juga sudah mulai dirintis oleh PSP IPB sejak tahun berdirinya tahun 1983 maupun sampai awal tahun 1990-an. Indikator semacam ini pada waktu itu disebut sebagai indikator lokal. Kata "lokal" berarti berlaku pada masyarakat tertentu dan dengan mudah diamati atau dipersepsi oleh masyarakat tertentu sebagai indikasi terjadinya suatu kondisi sosial tertentu pula.

Sebagai gambaran bagaimana indikator lokal tersebut dikembangkan dan diangkat sebagai indikator kesejahteraan atau tepatnya indikator kemiskinan dapat diikuti pada uraian berikut. Sejak pengembangan konsep Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI) yang dirintis secara keproyekan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi Depkes RI, dimana Sayogyo dan beberapa asistennya juga terlibat secara aktif sebagai pelaku peneliti maupun pengembangan SIDI, telah dikenal dalam studi Riwayat Krisis Pangan.

Dalam studi riwayat krisis pangan suatu daerah yang miskin dan rawan pangan, tidak mudah mendapatkan data-data kuantitatif yang akurat dan tersedia secara tepat waktu. Hal ini mengingat kualitas SDM aparat desa pada umumnya masih relatif rendah. Namun, sebagai contoh setiap masyarakat pedesaan dapat mengenali tanda-tanda (sebut isyarat) akan terjadinya rawan pangan, misalnya di

Boyolali, sekitar kampung-kampung yang kini dibangun waduk Kedungombo :

1. Bila di pasar, masyarakat sudah menjual alat-alat rumahtangga, maka merupakan isyarat bahwa masyarakat sudah mulai kehabisan stok pangan dan menjadi pertanda akan terjadinya krisis pangan.
2. Bila asap dapur penduduk tidak muncul pada jam-jam masak, menunjukkan bahwa kondisi sudah krisis pangan berat.
3. Bila binatang dari hutan sudah berani merambah ke desa permukiman penduduk, pertanda di hutan sudah kekeringan dan di pedesaan sudah mulai kesulitan air dan rawan pangan, gejala kurang makan bahkan hongerodim mulai ditemukan.
4. Bila pohon mangga berbunga banyak dan tidak rontok, lalu berbuah banyak biasanya menjadi pertanda akan terjadinya kemarau panjang, yang besar kemungkinan akan menyebabkan rawan pangan.

Bila gejala tersebut sudah mulai nampak, maka dalam kehidupan penduduk dapat ditemukan gejala perubahan pola konsumsi, yaitu mulai makan nasi bubur. Nasi dengan kandungan air yang banyak agar cukup mengenyangkan, lalu bisa jadi telah ditemukan pergeseran dari konsumsi nasi ke jagung atau campuran, atau bahkan sudah makan ubi-ubian, yang merupakan pertanda kesulitan pangan dan rawan gizi bagi masyarakat setempat. Pengamatan terhadap indikator rawan pangan ini, ternyata lebih bersifat kuratif, yang terjadinya gejala indikator tersebut karena telah terjadi rawan pangan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari kajian-kajian PSP IPB pada masalah indikator kesejahteraan sosial ini adalah bahwa lembaga penelitian harus dapat memanfaatkan berbagai potensi sumber data atau informasi untuk dapat mengidentifikasi kesejahteraan rakyat/ kemiskinan. Data kuantitatif yang tersedia, umumnya relatif kurang dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan pada tingkat rumahtangga, desa atau kabupaten, melainkan lebih tepat bila digunakan untuk indikator ketertinggalan suatu wilayah dibanding wilayah lainnya. Indikator kuantitatif juga terdapat kelemahan, antara lain:

1. Pelaporannya relatif terlambat, sehingga dokumen yang digunakan menjadi kurang aktual.

2. Ketajamannya relatif masih rendah, karena sering ada unsur kepentingan di dalam pelaporan data berkenaan dengan kondite penguasa wilayah dalam kepemerintahannya.

Apapun kondisinya, sebagai lembaga penelitian di PSP IPB telah berhasil memilih dan menggunakan data yang ada secara relatif tepat untuk keperluan analisis yang tepat pula dengan tingkat keakuratan datanya.

4. Konsep-konsep tentang pemerataan dan penanggulangan kemiskinan

Penelitian dan konsep yang sangat kental menjadi perhatian PSP IPB adalah menyangkut kemiskinan dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Dalam hal ini, dapat dilihat pemikiran Sayogyo mengemukakan penyempurnaan konsep delapan jalur pemerataan ditambahkan satu aspek lagi, yaitu "solidaritas sosial", yang kemudian disebut sebagai Delapan Jalur Pemerataan Plus.

Pemerintah dengan konsep triloginya yaitu pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan, telah dicanangkan dalam rencana pembangunan nasional. Dalam mengimplementasikan logi "pemerataan" itulah dikembangkan delapan jalur pemerataan. Dalam hal ini, PSP yang dipelopori oleh Sayogyo juga telah mencoba menghitung indek gini atau gini rasio tingkat pendapatan masyarakat. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di pedesaan masih lebih merata dibanding dengan di perkotaan, dengan perbedaan indek yang cukup signifikan.

Salah satu kelemahan yang tampaknya dilihat pada waktu itu adalah lemahnya solidaritas sosial di masyarakat perkotaan, yang sudah mulai menunjukkan ciri-ciri patembayan (*society*) dari pada ciri paguyuban (*community*). Pergeseran tersebut antara lain ditandai dengan melemahnya sikap solidaritas sosial pada masyarakat yang bergeser ke ciri perkotaan.

Menurut pangamatan penulis, Sayogyo tampaknya melihatnya berdasarkan pengalamannya dalam kajian-kajian yang dilakukan khususnya di PSP IPB mengenai kemiskinan dan krisis pangan, bahwa ketahanan sosial masyarakat dalam mengadapi krisis dan kemiskinan itu terjadi karena adanya mekanisme solidaritas sosial antara masyarakat yang lebih mampu (kuat atau kaya) terhadap masyarakat yang kurang mampu. Mekanisme itu bisa terjadi melalui mekanisme yang menyertai hubungan kekerabatan, hubungan tinggal dekat maupun prinsip hubungan dalam mewujudkan tujuan khusus.

Dari pengamatan dan pengalaman berbagai penelitian di PSP IPB, tampaknya ada kecenderungan sampai pada suatu gambaran yang jelas bahwa untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang diperlukan adalah kemampuan dan pengembangan keswadayaan masyarakat. Kalau menurut istilah yang populer sekarang ini adalah Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kesadaran masyarakat ini perlu tumbuh sejak dari mengenali potensi dan permasalahannya sendiri, serta merencanakan sendiri untuk mewujudkan apa yang diidam-idamkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemikiran Uphoff di awal tahun 1990an mewarnai para peneliti PSP IPB tentang Pembangunan dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dalam pengembangan masyarakat pada, dari dan oleh masyarakat itu sendiri perlu tumbuh dan berkembangnya energi sosial budaya kreatif, yaitu : *Ideal, Ideas*, dan *friendship*.

Pada dasarnya yang diperlukan adalah pengembangan masyarakat yang berbasis pada keberdayaan masyarakat itu sendiri, kehadiran pihak luar lebih menempatkan diri sebagai fasilitator. Dalam konsep energi sosial budaya kreatif itu maksudnya bahwa dalam masyarakat perlu tumbuh sesuatu yang sangat di idam-idamkan (*ideals*), kemudian berfikir mencari cara, bersikap positif terhadap perubahan, dan berusaha mencari cara (*ideas*) untuk mewujudkan apa yang diidam-idamkan tersebut. Selanjutnya secara bersama masyarakat membangun jaringan kerjasama baik internal maupun eksternal secara sinergis *friendship* dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan tersebut.

5. Pengembangan peluang usaha/kerja pedesaan dan di sektor luar pertanian

Dalam kurun waktu 1987-1990 PSP IPB bekerjasama dengan ISS The Hague Belanda dan PPLH ITB dalam penelitian tentang "peluang **usaha/ kerja pedesaan dan di sektor luar pertanian**" atau dikenal dengan istilah PUKLUTAN. Tidak kurang dari 33 working paper dihasilkan berdasarkan penelitian dengan pendekatan utama emik, empiris dan kualitatif (non survai kuiantitatif). Ada lima kelompok yang telah menjadi topik kajian dalam penelitian PUKLUTAN tersebut, yaitu :

1. Rural Industrialization (Industrialisasi Pedesaan)
2. Woman Studies (Studi Wanita)
3. Agribusiness – Agroindustries Studies (Studi Agroindustri – Agri-bisnis)
4. Capital Formation (Pembentukan Modal)
5. Policy Processes (Proses Kebijaksanaan)

5.1. Industrialisasi Pedesaan

Perhatian terhadap masalah pedesaan ini juga diwujudkan selain dalam bentuk penelitian dalam PUKLUTAN juga di dalam bentuk simposium. Simposium industrialisasi pedesaan diselenggarakan Pusat Studi Pembangunan LP-IPB di Bogor pada tanggal 18-19 Desember 1989 telah membahas prospek pelaksanaan industrialisasi pedesaan di Indonesia. Simposium ini menampilkan tidak kurang dari 17 makalah utama dan sejumlah makalah bahasan yang datang dari berbagai latar belakang ilmu dan profesi. Jumlah partisipan lebih dari 100 orang, yang dipercaya untuk mengelola topik industrialisasi pedesaan ini adalah Dr. Mangara Tambunan. Materi yang dibahas simposium diliput oleh berbagai media massa dari daerah dan ibukota. Ada prosiding dan *press release*.

Tema utama yang dibahas pada simposium adalah bagaimana status perkembangan ekonomi nasional terutama kaitannya terhadap ekonomi pedesaan 24 tahun terakhir. Pembahasan terfokus pada pertanyaan, apakah pembangunan pedesaan melalui pembangunan pertanian telah berhasil menaikkan kesejahteraan petani, melalui peningkatan produksi terutama intensifikasi tanaman pangan dan penyediaan lapangan kerja. Kemudian sejumlah makalah membahas masalah sekitar kekuatan dan kelemahan industrialisasi pedesaan. Masalahnya adalah apakah industrialisasi pedesaan secara makro akan dapat berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan sekaligus menyumbang pada pertumbuhan ekonomi.

Makalah lain yang menarik adalah pembahasan sekitar masalah pertanyaan apakah agro-industri dapat berperan sebagai penggerak industrialisasi pedesaan. Kemudian menyusul pembahasan aspek regionalisasi pedesaan, dampak aglomerasi industri, peranan pasar modal, dan aspek sosial-budaya pedesaan. Pembahasan diperluas dengan berbagai kasus komoditi dan pedesaan di pantai.

Berikut ini hasil rumusan dari aspek-aspek yang terkait dengan simposium tersebut.

Pengertian Industrialisasi Pedesaan

Para ekonom cenderung membatasi pengertian industri pedesaan secara sempit pada industri rumah tangga dan industri berukuran kecil. Pengertian seperti ini mungkin berguna tetapi belum cukup lengkap untuk digunakan sebagai pedoman. Pada kenyataannya banyak industri berukuran besar yang berpengaruh terhadap ekonomi pedesaan.

Simposium sendiri tidak melihat adanya suatu batasan industri pedesaan yang bersifat universal dan (dengan demikian) berlaku untuk Indonesia. Namun dengan mempertimbangkan berbagai batasan dari berbagai sumber, simposium sepakat bahwa industri pedesaan adalah suatu bentuk transisi antara industri yang bersifat artisan dengan industri modern. Industri pedesaan itu dapat berfungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Kaitan ini, pedesaan melalui mekanisme pasar dapat mengakumulasi dan mengalihkan modal dari sektor pertanian ke sektor industri. Pedesaan dapat pula meningkatkan penyerapan angkatan kerja yang senantiasa bertambah di pedesaan.

Batasan-batasan di atas menunjukkan bahwa pedesaan memiliki dimensi dan implementasi yang sangat luas. Di Indonesia pedesaan cenderung diartikan sebagai bagian dari alat pembangunan pedesaan (dengan ukuran industri kecil dan industri rumahtangga), bukan bagian dari pembangunan industri modern.

Industrialisasi pedesaan konteks ekonomi Indonesia haruslah dilihat dalam pengertian yang lebih luas, yakni sebagai usaha transformasi masyarakat pertanian pedesaan ke arah masyarakat yang bersifat industrial. Dalam hal ini industrialisasi pedesaan menampilkan peranan penting Dalam pembentukan organisasi sosial yang bersifat industrial. Industrialisasi pedesaan sekaligus juga berfungsi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, dan hal ini dapat diukur antara lain dari segi pendapatan dan lapangan kerja baru. Secara sempit industrialisasi pedesaan menampilkan peranan penting dalam pembentukan organisasi sosial yang bersifat industrial. Industrialisasi pedesaan sekaligus juga berfungsi meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja baru. Secara sempit industrialisasi pedesaan bertujuan untuk menganekaragamkan (diversifikasi) ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Alasan Strategis Pilihan Industrialisasi Pedesaan

Dari makalah dan pembahasan dalam simposium, paling tidak ada delapan alasan mengapa industrialisasi pedesaan penting dilakukan:

(a) Program industrialisasi pedesaan akan memacu pertumbuhan ekonomi karena industrialisasi akan mampu meningkatkan produktrivitas nilai tambah yang sebagian dapat tinggal di dalam ekonomi pedesaan dan sebagian lagi dinikmati oleh pemilik modal usaha.

(b) Dari segi makro dan mikro tidak dapat dipungkiri adanya kepincangan antara lapisan atas dan lapisan bawah masyarakat. Hal ini dapat mendatangkan bahaya sosial dan politik apabila tidak ditanggulangi. Dalam kaitan ini, program industrialisasi pedesaan dapat berfungsi sebagai alat pemerataan karena: (a) dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, (b) akan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga lebih memungkinkan realisasi usaha pemerataan pendapatan.

(c) Program industrialisasi pedesaan dapat memperbaiki kepincangan struktur industri yan terjadi dalam 20 tahun terakhir. Simposium melihat bahwa berbagai kebijaksanaan ekonomi, terutama dalam investasi, cenderung bias ke arah usaha-usaha yang bersifat padat modal dan berskala besar, semantara usaha-usaha kecil yang bersifat padat kerja kurang memperoleh perhatian. Keadaan ini terjadi karena harga relatif modal diciptakan lebih murah pada pengusaha besar sehingga mereka lebih terangsang menggunakan metode produksi yang bersifat padat modal. Kehadiran industri pedesaan akan memperbaiki dan mengoreksi keseimbangan struktur industri besar, sedang, dan kecil tersebut.

(d) Industrialisasi pedesaan dapat menciptakan struktur ekonomi pedesaan yang bersifat atraktif bagi investasi. Investasi di pedesaan yang pada gilirannya akan mengurangi migrasi. Simposium melihat bahwa dengan pertumbuhan penduduk 2,1% dan angkatan kerja rata-rata 3-4% per tahun, dan daya absorbsi tenaga kerja yang menurun pada pertanian tanaman pangan, masalah pengangguran di pedesaan akan semakin meningkat sehingga arus migrasi desa-kota juga akan meningkat. Dalam kaitan ini industrialisasi pedesaan dapat mendukung diversifikasi ekonomi (sumber pendapatan) penduduk pedesaan, sehingga arus migrasi dapat ditekan.

(e) Berlainan dengan proses industrialisasi di daerah kota, industrialisasi pedesaan atau pembangunan daerah/ masyarakat pedesaan umumnya memiliki sejumlah "keunggulan" tertentu yaitu:

i Tidak memerlukan adanya perpindahan tenaga kerja (penduduk) dari suatu daerah (desa) ke daerah lain (kota) dengan segala konsekuensi pemukimannya;

ii Tidak memerlukan prasarana modern yang berskala besar, padat modal, dan berbiaya mahal;

iii Memberikan waktu dan peluang kepada masyarakat tradisional di pedesaan untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kegiatan di luar pertanian secara bertahap dalam periode yang lama;

iv Menghasilkan produk yang "muatan lokal"-nya relatif tinggi dan sesuai dengan pola kebutuhan dan selera masyarakat lapisan bawah; dan

v Memberikan peluang kepada badan usaha yang bersifat kekeluargaan kuat, yang biasa ditingkatkan melalui koperasi atau asosiasi (paguyuban), dan memberi harga diri masyarakat pedesaan.

(f) Selama ini investasi pembangunan pedesaan berpusat pada pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya padi. Penekanan investasi pada tanaman pangan sebagai suatu pendekatan sebenarnya mengandung berbagai kelemahan. Salah satu diantaranya dan terpenting adalah ketidaktepatan pendekatan itu untuk diterapkan pada desa yang potensial bukan desa pertanian. Bagi kategori desa seperti ini, industrialisasi pembangunan lebih tepat sebagai alternatif pembangunan.

(g) Dalam proses pembangunan pertanian (BIMAS/INMAS), penerapan unsur-unsur teknologi baru untuk sebagian dapat menciptakan lapangan kerja baru, tetapi sebagian lagi justru mengurangi lapangan kerja terutama bagi wanita. Teknologi bibit unggul mungkin telah memperluas lapangan kerja, tetapi sebaliknya teknologi pasca panen seperti mesin pengirik (thresher) dan huller cenderung mempersempit lapangan kerja khususnya wanita. Dalam konteks ini, program industrialisasi pedesaan pantas dipertimbangkan sebagai alternatif jalan keluar untuk mengatasi masalah penyempitan lapangan kerja yang terutama dihadapi wanita pedesaan tersebut.

(h) Simposium melihat bahwa dalam konteks pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri sekarang ini secara struktural kurang memiliki kaitan-pengaruh (diukur dengan pendapatan dan tenaga kerja) ke hulu dan ke hilir. Pola pertumbuhan ekonomi yang demikian, disamping bersifat tidak langgeng, akan memperbesar jurang kesenjangan sosial ekonomi. Untuk menutupi dan mencegah pelebaran kesenjangan tersebut, perlu diupayakan jembatan yang menghubungkan industri besar padat modal dan modern dengan industri yang menggunakan bahan baku lokal dan bersifat padat kerja. Dalam hal ini perkembangan agro-industri dapat menjadi motor penggerak sehingga perlu ditangani segera.

Strategi Industrialisasi Perdesaan

Dalam pelaksanaan program industrialisasi pedesaan strategi berikut perlu diperhatikan:

(a) Pemerintah terutama secara politis harus memiliki komitmen penuh terhadap pelaksanaan program. Komitmen ini harus tergambar dalam kebijaksanaan makro di bidang fiskal dan moneter yang bersifat menciptakan kondisi pendukung bagi pertumbuhan industri yang berhubungan dengan sumber daya dan ekonomi pedesaan.
(b) Dalam simposium timbul kesan kuat bahwa industri pedesaan itu dinilai lebih merupakan alat pemerataan saja serta kurang mendapat perhatian sebagai penyangga kelangkaan kesempatan kerja di pedesaan. Walaupun mungkin pemikiran ini mengandung kebenaran dalam skala makro, akan tetapi kemungkinan industrialisasi pedesaan sebagai alat pertumbuhan ekonomi pedesaan harus dipertimbangkan pula.
(c) Dalam simposium timbul aliran pemikiran bahwa dari sudut pendekatan lokasi, industrialisasi pedesaan sebaiknya bertempat di pedesaan. Industri pedesaan itu juga sebaiknya berintikan industri kecil/sedang dan industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan pangan dan hasil pertanian, barang sandang, barang kerajinan, bahan bangunan, dan perabotan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jenis-jenis industri itu banyak dijumpai dan berpengaruh di pedesaan.
(d) Mayoritas industri kecil dan rumah tangga merupakan usaha milik keluarga. Kontrol kualitas produksi industri tersebut umumnya masih rendah, dan perangkat usaha yang layak seperti kepekaan bisnis juga belum tumbuh di kalangan pemiliknya.

Mengingat derajat ketahanan dan perkembangan usaha industri kecl akan sangat tergantung pada keadaan pengelolaan internal dan faktor lingkungan, maka perlu diciptakan jalur kelembagaan yang berfungsi membina usaha-usaha kecil tersebut.

(e) Untuk menunjang program industrialisasi pedesaan pemerintah dapat mengambil peranan dengan menciptakan sumber teknologi, mengusahakan kredit, membina jaringan pemasaran hasil industri kecil. Secara khusus, untuk menjamin pemasaran hasil, simposium melihat perlunya menggalakkan serta meningkatkan kualitas sistem kerjasama "bapak-anak angkat" atau sub kontrak antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, sehingga memberi manfaat serta keuntungan yang optimal bagi kedua belah pihak. Pembinaan kerjasama ini dapat diarahkan terutama pada peningkatan volume barang produksi industri kecil yang layak ekspor.

(f) Program industrialisasi pedesaan hendaknya diusahakan secara berimbang antar daerah, sehingga pertumbuhan kesempatan kerja dan ekonomi berjalan seimbang pula. Namun demikian mengingat adanya keragaman ekonomi antar daerah, titik berat program industrialisasi pedesaan harus ditetapkan sesuai dengan keadaan sumber daya tiap daerah.

(g) Dewasa ini pertumbuhan industri di berbagai daerah berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda. Agar industri dapat tumbuh secara efektif di tiap daerah, program industrialisasi pedesaan perlu didekati dengan menggunakan strategi pengembangan regional, dengan memperhatikan tingkat perkembangan masing-masing daerah. Strategi regional ini diserahkan kepada tiap propinsi untuk kemudian diterjemahkan ke tingkat sub regional seperti kabupaten/kecamatan. Strategi regional harus berisikan: 1. Fungsi pemerintah dalam investasi, 2. Pembinaan teknologi, 3. Pengembangan jaringan pemasaran ke dalam dan ke luar negeri, dan 4. Pembinaan institusi sosial seperti yang bersifat menunjang industrialisasi pedesaan.

(h) Dalam upaya menggerakan program industrialisasi pedesaan, beragam institusi sosial (misalnya : pedagang/ pengusaha swasta, guru dan aparat pemerintah) di pedesaan perlu dipertimbangkan sebagai kekuatan penggerak dalam konteks industrialisasi pedesaan, beragam institusi sosial dan kelompok profesi ini potensil sebagai kekuatan penggerak diversifikasi ekonomi pedesaan.

(i) Potensi tenaga kerja wanita sangat besar di pedesaan. Dalam konteks industrialisasi pedesaan, perlu dipikirkan jenis-jenis industri yang dapat menyerap tenaga kerja wanita. Sejauh ini, tenaga kerja wanita terserap cukup banyak hanya pada jenis-jenis industri tertentu, seperti industri rokok dan industri barang sandang.

Agenda penelitian

Dalam simposium sangat terasa bahwa sebagian data makro sudah tersedia sebaliknya informasi/data dasar belum banyak tersedia. Dalam data statistik misalnya, sangat sukar membedakan industri yang berlokasi di pedesaan dan yang berlokasi di kota. Demikian pula belum banyak data mikro tentang industri kecil atau rumah tangga, struktur sosial dimana industri tumbuh atau mati, organisasi usaha, dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah beberapa agenda penelitian yang perlu dilaksanakan oleh berbagai badan penelitian/pengkajian pemerintah dan swasta.

Pada Tingkat Mikro

(a) Perlu disusun suatu klasifikasi komoditi yang diproduksi oleh industri menurut waktu produksi dan bentuk fungsi produksi.
(b) Perlu diestimasi tingkat kecenderungan "marginal untuk mengkonsumsi" (*marginal prospensity to consume*) dari barang-barang industri di kota dan di desa. Di samping itu, perlu juga diestimasi elastisitas harga dan pendapatan pada barang-barang industri tersebut.
(c) Meneliti aspek penelitian dan pengembangan industri dan aspek adopsi inovasi pada industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga.
(d) Mempelajari proses, manajemen dan organisasi, dan hubungan produksi pada industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga.

Tingkat Sektoral-Regional
(a) Meneliti pengaruh kota dan pusat-pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan industri pedesaan.
(b) Meneliti pengaruh kebijaksanaan pengadaaan barang pemerintah terhadap petumbuhan industri pedesaan menurut dugaan, salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri di Indonesia

adalah kegagalan industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga dalam proses "pembentukan modal" (*capital formation*). Dalam kaitan ini sangat diperlukan suatu penelitian mengenai pembentukan modal pada ketiga kelompok industri tersebut.

(c) Mempelajari berbagai model pembangunan daerah mencangkup antara lain aspek-aspek pembiayaan pembangunan, pajak, pembangunan infrastruktur, dan kendala industrialisasi pedesaan.

(d) Setelah deregulasi perbankan di kota dan di pedesaan. Penting diteliti bgaimana struktur pasar, sistem perkreditan bank resmi dan institusi keuangan lainnya dalam penyediaan modal. Dalam hubungan ini, beragam lembaga pedesaan seperti koperasi/KUD perlu dikaji peranannya.

Pada Tingkat Makro

(a) Meneliti pengaruh kebijakan fiskal, moneter, aglomerasi, rezim perdagangan terhadap industrialisasi pedesaan.

(b) Mempelajari berbagai kebijaksanaan makro ekonomi yang berkaitan dengan sektor petanian dan berpengaruh terhadap industri pada umumnya dan pertanian pada khususnya.

5.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam penelitian PUKLUTAN yang melibatkan kerjasama tiga pihak yaitu PSP IPB, ISS The Hague, dan PPLH ITB, salah satu topik kajiannya adalah *policy processes.* Salah satu topik khusus dalam kajian itu adalah menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia tentang "Desentralisasi, deregulasi dan debirokratisasi" yang merupakan salah satu bentuk kajian atas "Paket De" yang cukup populer pada waktu itu. Paket De, tampaknya dimaksudkan untuk merespon kondisi "governance" pada waktu itu dinilai terlalu sentralistis, birokratis, sehingga diperlukan peninjauan dan perbaikan regulasi-regulasi yang telah ada.

Tim peneliti terdiri dari Nico G Schulte Nordholt dari Belanda, dan sejumlah peneliti dari PSP IPB yaitu Sutarto, Sumardjo, Sutarno, Iskandar dan Purwanto. Mereka memfokuskan penelitian pada kebijakan dan kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu rekomendasi tim peneliti yang penting dicatat adalah :

"Otonomi Daerah yang perlu diperkuat adalah otonomi pada tingkat kabupaten dan juga pada tingkat desa".

Implikasi dari rekomendasi ini adalah bahwa sistem manajemen di daerah perlu dibenahi, yaitu (1) struktur Pemerintah Daerah dapat dijadikan media karir, (2) diterapkan pola *merit system* dalam manajemen, (3) disediakan upaya peningkatan kualitas SDM Aparat Daerah untuk meningkatkan kemampuannya melayani upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan daerah, (4) pola pikir aparat yang cenderung hanya melayani Penguasa Pusat secara bertahap dirubah menjadi melayani kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dalam pembangunan daerah, dan (5) pejabat di daerah tidak perlu terlalu tergantung pada penguasa di tingkat atas dalam menyusun program pembangunan dan alokasi anggarannya, tetapi hubungan tersebut sifatnya lebih kolegial/partnership, dan perlu dikembangkan untuk lebih mampu aspiratif, kreatif dan penuh inisiatif (*entrepreneurial)* untuk melayani tercapainya kesejahteraan rakyat dalam pembangunan daerah.

Rekomendasi penting tersebut disampaikan dalam forum workshop nasional yang melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional maupun peneliti terkait di tingkat yang lebih luas. Rekomendasi ini kemudian benar-benar menjadi kenyataan sepuluh tahun kemudian, terlepas dari fakta apakah pembuat rekomendasi itu didasarkan atas hasil penelitian ini atau tidak, yang jelas faktanya hal itu telah direkomendasikan jauh sebelum diundangkan di Indonesia.

Kenapa otonomi di Tingkat Kabupaten dan Desa, bukan di tingkat propinsi, yang terpikir pada waktu itu adalah apabila otonomi di tingkat propinsi diperkirakan peluang untuk terjadinya disintegrasi nasional akan tinggi bila otonomi sangat kuat di tingkat propinsi. Disintegrasi yang dimaksud disini tampaknya adalah yang mengarah pada munculnya negara baru pemisahan diri, bila stabilitas nasional tidak efektif mengendalikan ego kedaerahan.

Bila saat ini otonomi daerah kemudian tampak menjadi otonomi kedaerahan, etnosentris, ini tampaknya terkait dengan terabaikannya implikasi rekomendasi yaitu "penerapan pola *merit system* dalam manajemen pemerintahan". Akibat semakin menguatnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang gejalanya memang sudah ada sejak dulu. Ini barangkali kelemahan rekomendasi pada hasil penelitian PSP IPB tersebut, kurang mengantisipasi menguatnya budaya "KKN" tersebut, terutama yang terkait dengan etnosentrisme dalam birokrasi pemerintahan di daerah. Mestinya budaya KKN secara berangsur melemah sejalan dengan penerapan pola *merit* *system"* dalam sistem manajemen pemerintahan di Indonesia ini, seperti yang direkomendasikan Tim peneliti dari PSP IPB pada waktu itu.

Penting untuk dicermati, kenapa rekomendasi seperti itu muncul dari hasil penelitian tim di PSP IPB dan ISS The Hague. Berikut ini temuan-temuan yang dapat dikemukan sebagai argumentasi, kenapa otonomi penting diperkuat di tingkat Kabupaten dan di Tingkat Desa.

a. Pendekatan pembangunan yang terpusat/sentralistis faktanya sering kurang efektif mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat desa dan kabupaten.
b. Sering dengan pendekatan sentralistis ini, perencanaan di tingkat kabupaten terkorbankan dan kepentingan Pusat yang menjadi prioritas. Faktanya program pembangunan daerah menjadi kurang berdaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kepentingan pusat lebih dominan dan akibatnya program pembangunan kurang mengakar pada kebutuhan masyarakat, karena itu masyarakat menjadi kurang akses terhadap pembangunan. Akibatnya masyarakat juga kurang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat pun relatif sangat lemah, masyarakat lebih ditempatkan sebagai pihak yang pasif, hanya melaksanakan dengan "imbalan" materiil yang itupun dinilai kurang sepadan.
c. Kualitas SDM di tingkat kabupaten kurang berkembang, karena "tekanan" pusat menyebabkan melemahnya kreatifitas dan inisiatif para birokrat, sebaliknya justru menciptakan ketergantungan pada Pusat.
d. Kurang terjamin tersedianya SDM di Daerah Tingkat II (sebut kini Kabupaten/Kota) karena beberapa alasan, (1) golongan pangkat dan jabatan di Daerah Tingkat II sangat terbatas, faktanya tertinggi sekitar golongan IV/a sehingga struktur/ hierarkhi tidak memungkinkan menjadi iklim yang kondusif bagi karir birokrat; (2) Karena sebab pertama, setiap aparat yang telah berpangkat golongan III/d sudah gelisah dengan berbagai caranya berusaha untuk dapat naik ke Daerah Tingkat I dan seterusnya ke Pusat, sehingga aparat cenderung berorientasi ke Pusat (kurang melayani masyarakat) sehubungan dengan karirnya tersebut; (3) secara sosiologis Aparat Pusat dinilai lebih bergengsi, sehingga secara psikologis memperlemah motivasi aparat daerah untuk berinisiatif mengkritisi kebijakan Pusat yang sering dinilainya tidak tepat dan bahkan tidak mengenakannya sekalipun. Akibatnya aparat di

Daerah Tingkat II yang relatif senior akan tersedot atau terdorong untuk naik ke Pusat dan Daerah menjadi tidak pernah tersedia aparat senior dan juga menjadi kurang tersedia kualitas SDM aparat kreatif.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil karya PSP IPB pada masa PUKLUTAN ada baiknya dicermati kembali. Di sana ada lebih dari 33 *working paper*, yang pada waktu itu sebenarnya siap publikasi, sayang tidak terdukung dana memadai. Hal ini dapat diakui sebagai satu kelemahan PSP IPB di masa 1983-1991 itu, kurang menempatkan publikasi secara memadai, sehingga kurang banyak dibaca oleh masyarakat luas. Kalaupun ada publikasi sifatnya lebih karena ketertarikan media massa atas hasil-hasil penelitian yang secara periodik disajikan dalam simposium secara terbuka untuk umum.

Di sisi lain, kegiatan PSP IPB ke depan kiranya juga masih akan tetap konsisten, untuk melangkah lebih maju dalam penelitian dan rekomendasi yang dihasilkannya, sehingga secara sadar tidak terjebak pada penelitian pesanan yang biasanya penelitian semacam pesanan ini cenderung sekedar menyimpulkan fakta apa yang sudah terjadi, serta menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah secara "tambal sulam".

5.3. Agribisnis dan Agroindustri

Topik Agribisnis dan agroindustri telah menjadi topik kajian penting bahkan sebelum topik tersebut menjadi hangat di Indonesia. Tokoh yang mendapat kepercayaan untuk mendalami topik ini adalah almarhum Prof. Dr. Ahmad Soeharjo, yang memang secara konsisten melempar konsep agibisnis-agroindustri ini bahkan sebelum tahun 1980an, saat mana konsep agribisnis dan agro-industri masih terasa asing bagi telinga kebanyakan masyarakat di Indonesia. Besarnya perhatian terhadap konsep agribisnis ini secara nyata dapat dilihat dari perubahan nama program studi (dulu bagian) di Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi (SOSEK) Fakultas Pertanian, tempat Soeharjo aktif sebagai dosen, dirubah namanya dari "Ekonomi Perusahaan Pertanian" menjadi "Agribisnis" pada tahun 1980an.

Dalam penelitian di PSP IPB kurun waktu 1983-1991 tentang topik agribisnis agroindustri ditemukan bahwa nilai tambah komoditi pertanian yang diperoleh petani akan meningkat secara sangat signifikan apabila petani, yang waktu itu hanya menjadi pelaku dalam subsistem produksi, dapat meningkatkan bidang pengelolaannya tidak hanya terbatas pada subsistem produksi saja. Nilai tambah komoditi pertanian sangat signifikan pada pasca produksi, yaitu di subsistem pengolahan, dan pemasaran hasil.

Dalam suatu komoditi perkebunan, teh misalnya sektor agribisnis agroindustri ini sangat potensial menyerap tenaga kerja di pedesaan. Namun, masalahnya adalah tingkat pendapatan dan kesejahteraan para pelaku di sub sektor ini faktanya masih sangat rendah. Demikian pula di dalam komoditi lainnya, para pelaku masih belum cukup berdaya untuk meningkatkan peluang meraih nilai tambah di subsistem agribisnis, khususnya agro-industri ini. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak terkait sehubungan dengan upaya meningkatkan nilai tambah petani dan pelaku agribisnis hulu melalui suatu kebijaksanaan dan upaya program pembangunan pertanian ke depan.

Peneliti dari UGM, Abdulrahman dan Supadmo yang sejarawan, yang juga bergabung dalam TIM PSP IPB menemukan bahwa kemiskinan di perkebunan mempunyai latar belakang sejarah dan budaya. Catatan : ini dituangkan menurut apa yang diingat oleh penulis dari dalam suatu rapat tentang hasil studi tentang sejarah perkebunan tersebut.

Pada masa penjajahan Belanda, saat mana pola agroindustri perkebunan diperkenalkan di Nusantara ini, etos kerja masyarakat masih sangat lemah. Masyarakat mau bekerja di perkebunan dengan giat apabila merasakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada masa itu memang masih mudah mencari nafkah dari berburu dan meramu.

Ketika masyarakat direkrut sebagai tenaga kerja di perkebunan diperlukan pengawasan yang cukup ketat dan saat itulah masyarakat mulai mengenal upah dan kerja dengan jadwal waktu tertentu yang jelas. Biasa para tenaga kerja dari masyarakat yang direkrut untuk bekerja sebagai buruh perkebunan tersebut mendapat upah secara mingguan. Setelah mendapat upah diawal minggu kemudian para buruh tidak banyak yang hadir bekerja. Setelah diselidiki, ternyata buruh tersebut tidak bekerja karena masih memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Kemudian kondisi ini disadari oleh penguasa kebun dan diterapkanlah cara bagaimana agar pada hari Senin pekerja sudah mau bekerja, yaitu dengan cara menguras uang pada saat gajian di akhir minggu.

Oleh karena itu, disetiap gajian dikembangkan pasar yang menjual barang-barang yang menarik para buruh untuk membelanjakan uangnya. Untuk lebih sempurnanya cara ini, di setiap akhir minggu saat gajian buruh tersebut disediakan hiburan, termasuk, maaf, gejala judi dan prostitusi, sehingga sebagian besar uang hasil gaji buruh terkuras sebelum sampai ke rumah lagi. Dengan begitu, hari Senin para buruh sudah berkantong tipis dan mau tidak mau bekerja lagi, dan lebih giat untuk dapat memperoleh uang agar dapat menikmati hari Sabtu yang "indah".

Kini keadaan tersebut tampaknya, sejalan dengan berlangsungnya waktu telah menjadi budaya. Masyarakatpun tidak menyadari adanya rekayasa seperti itu, bahkan sebagian besar menikmatinya. Diduga berbagai hiburan rakyat tidak mustahil merupakan bagian dari rekayasa soial "negatif" dari penguasa pada waktu itu dapat ditemukan, misalnya budaya "Dongbret" di wilayah pantai utara Jawa, tidak menutup kemungkinan merupakan cara bagaimana penguasa pada waktu itu mendapatkan komoditi perikanan secara memadai dan harga relatif murah. Hal ini menjadi peluang melemahnya bargaining power masyarakat dalam pemasaran produk usaha mereka kepada para tengkulak dan eksportif pada masa penjajahan tersebut.

Contoh lain, dari hasil penelitian tim peneliti "agrowisata" PSP IPB menemukan adanya keyakinan penduduk, bahwa "nelayan dan keluarganya tabu untuk mengkonsumsi hasil tangkapan mereka", kenapa ?, menurut mereka apabila ikan dan hasil laut dikonsumsi oleh keluarga nelayan, maka penguasa laut bisa marah dan akan sulit memperoleh ikan, serta bila tetap memaksa mengkonsumsi maka akan dilanda penyakit gatal-gatal dan sejenisnya. Faktanya, hasil kerja nelayan semua mengalir ke pasar dan dinikmati oleh orang-orang yang mampu membelinya, yang tidak lain adalah keluarga penguasa saat itu, yang berperan sebagai "penjajah".

Uraian yang serba terbatas tersebut, merupakan sekedar ungkapan ringkas dari cuplikan catatan lapangan yang mesti penulis baca, karena penulis adalah penanggungjawab pengelolaan catatan lapangan seperti itu maupun data yang lain. PSP IPB sangat teliti dalam mendokumentasikan data kuantitatif maupun kualitatif berupa catatan lapang. Pelajaran sebagai peneliti di PSP IPB pada waktu itu adalah bahwa dalam penelitian harus sampai dapat "melihat apa yang tersirat, bukan hanya apa yang tersurat" atas fenomena-fenomena sosial yang tampak secara visual, tetapi juga makna dan nilai yang terkandung secara kualitatif dibalik fakta yang tampak secara visual tersebut.

Kembali kepada topik agribisnis-agroindustri, kini topik agribisnis-agroindustri telah populer secara nasional, antara lain juga dimotori oleh tokoh-tokoh pemimpin PSP IPB berikutnya, yaitu Prof. Dr. Bungaran Saragih dan Dr. Bayu Krisnamurthi. Perjuangan mereka memang ada dasar kronologi sejarah di PSP IPB dan kini berkibarlah bendera agribisnis dan agroindustri ini, tidak hanya di IPB tetapi di tingkat yang lebih luas nasional, dengan berbagai pengembangan yang mungkin sudah jauh lebih kompleks. Mudah-mudahan perjuangan mengembangkan agribisnis-agroindustri oleh semua pihak tidak terlepas dari sifat keadilan, terutama bagi lapisan masyarakat yang masih lemah dan kurang beruntung.

5.4. Kajian Wanita

Kajian wanita telah dirintis sejak cikal bakal PSP IPB, yakni di Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan.(LPSP) IPB dengan tokoh utamanya Prof. Dr. Pujiwati Sayogyo. Pujiwati Sayogyo (almarhum) termasuk salahsatu pelopor utama kajian wanita di Indonesia dan pendiri Pusat Studi Wanita di IPB. Banyak peneliti PSP IPB terlibat dan belajar banyak tentang topik kajian peranan wanita ini.

Dalam kajian di PSP IPB ini sampai pada suatu rumusan kesimpulan bahwa kedudukan wanita perlu setara dengan pria. Wanita ibu rumahtangga sering dianggap lebih rendah dibanding wanita pekerja di luar rumahtangga. Dengan suatu konsep kerja yang tepat, tidak ada alasan wanita rumahtangga berkedudukan lebih rendah dibanding pria maupun wanita yang bekerja di luar rumah.

Rumusan konsep "bekerja" secara jelas terungkap dalam berbagai penelitian di PSP IPB, mengacu pada Oakley, Chayanov, Sahlin, Nerlove dan White (Pujiwati Sayogyo, 1983). Dikatakan termasuk katagori "bekerja" apabila memenuhi persyaratan bagi pelaku :

a. mengeluarkan energi,
b. terjalin dalam interaksi sosial dan mendapat status,
c. memberikan sumbangan dalam produksi barang maupun sebagai jasa,
d. mendapatkan penghasilan (*cash* atau *natura*), dan
e. mendapatkan hasil yang memperoleh nilai waktu.
f. Dalam penelitian PSP IPB juga tersirat, konsep perubahan atau pergeseran nilai kerja bisa terjadi dalam arti :

g. perubahan dalam bentuk fisik (misalnya dari pola tanam konvensional ke pola intensifikasi)
h. perubahan dalam transaksi sosial (misalnya : status petani penyakap menjadi petani pemilik)
i. perubahan dalam kegiatan ekonomi (misalnya: penurunan pendapatan pada buruh tani, dan
j. perubahan dalam identitas.

Demikianlah catatan yang serba terbatas dari penulis tentang studi wanita ini, terbatas dalam arti persepsi dan cakupan substansi yang dapat diingat penulis dan waktu penulisan yang juga sangat terbatas. Di PSP IPB dalam kajian wanita ini menghasilkan lebih dari 17 topik penelitian tesis S2, berkat kerjasama dengan Ford Fondation. PSP IPB bekerjasama dengan Ford Fondation telah menjadi media pengelolaan beasiswa dan pembiayaan penelitian-penelitian bagi kajian wanita di Indonesia. Kegiatan ini diteruskan menjadi salah satu kajian utama ketika ketika bekerjasama dengan ISS The Hague Belanda, dengan topik kajian gender.